

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
Npm : 1605170404
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 AGUSTUS 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **RIEDA ATIQOH DAULAY**
N P M : **1605170404**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

(IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDLY, SE., M.M)

Pembimbing

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Y.H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIFDA ATIQOH DAULAY
N.P.M : 1605170404
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
NPM : 1605170404
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”** adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,


(Rifda Atiqoh Daulay)

ABSTRAK

Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Rifda Atiqoh Daulay

Program Studi Akuntansi

Email : rifdaatika@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Berdasarkan Proses pemilihan sampel menggunakan metode Sampling Jenuh dengan kriteria diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut terdiri dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga Konstan untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Data diperoleh dari website badan pusat statistik www.bps.sumut.go.id. Sedangkan Laporan Realisasi Belanja Modal dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tercatat di Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, Data diperoleh dari website www.kemenkeu.go.id. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan secara parsial ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Secara parsial ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Secara simultan Ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 62,3% artinya menunjukkan bahwa sekitar 62,3% variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dan sisanya 37,7% pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT***The Influence of Capital Expenditure and Regional Original Income (PAD) on Economic Growth in North Sumatera Province*****Rifda Atiqoh Daulay**

Accounting Study Program

Email : rifdaatika@gmail.com

The purpose of this study was to analyze and determine the effect of capital expenditure on economic growth in all 33 regencies / cities in North Sumatra province, the effect of local revenue (PAD) on economic growth in all 33 regencies / cities in North Sumatra Province. To determine the effect of capital expenditure and local revenue (PAD) simultaneously affect the economic growth of all 33 districts / cities in North Sumatra Province. This study uses a quantitative approach. Based on the sample selection process using the Saturated Sampling method with the above criteria, it can be seen that the number of samples used in this study were 33 districts / cities in North Sumatra Province. The data consists of GRDP (Gross Regional Domestic Product) at constant prices to determine the Economic Growth of Regencies / Cities in North Sumatra Province. Data is obtained from the website of the central statistics agency. www.bps.sumut.go.id. Meanwhile, the Capital Expenditure Realization Report and PAD (Regional Original Revenue) are recorded in the Regional Government Financial Balance. Data is obtained from the website www.kemenkeu.go.id. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it shows that partially there is an influence between Capital Expenditures on Economic Growth in the North Sumatra Provincial Government for the 2016-2019 Period. Partially there is an influence between Original Regional Revenue on Economic Growth in the Government of North Sumatra Province for the 2016-2019 Period. Simultaneously, there is an effect of capital expenditure and local revenue on the economic growth of the North Sumatra provincial government for the 2016-2019 period. The result of the R-Square value is known to be 62.3%, meaning that it shows that about 62.3% of the economic growth variable (Y) is influenced by Capital Expenditures and Regional Original Income and the remaining 67.7% of Economic growth is influenced by other variables not examined in this research.

Keywords: Capital Expenditures. Original Local Income, Economic Growth

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini yang berjudul ***“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”***

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah Bincar Daulay SH dan Bunda Evita Lubis Dra serta Abang Saya Rifki Algi Fahri Daulay yang telah memberikan segala do'a, kasih sayang, perhatian, semangat dan pengorbanan baik secara materil dan immateril kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Maya Sari, SE., M.Si selaku Dosen PA yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan.
9. Ibu Dr. Maya Sari, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.

12. Teman-teman kelas H-Akuntansi Pagi dan kelas Konsentrasi Sektor Publik Malam yang semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.

13. Kawan-kawan pejuang skripsi (Eki, Aul, Cherline, Riska, Nanik, Tami, Febri, Nita) yang telah memotivasi, membantu dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Sahabat penulis Musdalifah Azzura Lubis yang telah memberikan semangat motivasi kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2020

Rifda Atiqoh Daulay

1605170404

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.1.3 Produk Domestik Regional Bruto	21
2.1.2 Belanja Modal.....	24
2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal	24
2.1.2.2 Macam-Macam Belanja Modal	25
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	31
2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	36
2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37
2.1.3.5 Potensi peningkatan Pendapatan PAD	38
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	43
2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	44
2.3.3 Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	46
2.4 Hipotesis	48
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Defenisi Operasional.....	49
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55

3.4 Teknik Pengambilan Sampel	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6 Teknik Analisis Data	58
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Hasil Penelitian	65
4.2 Pembahasan.....	79
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019	4
Tabel 1.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019	8
Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019	13
Tabel 2.2 Review Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Defenisi Variabel Operasional	54
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian	56
Tabel 3.3 Daftar sampel penelitian.....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	68
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial).....	74
Tabel 4.7 Hasil Uji- F (Simultan).....	77
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual	47
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis.....	62
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)	63
Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot.....	67
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	70
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t	75
Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t	76
Gambar 4.5 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Wayan et al., 2015). Dimana pembangunan nasional berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketika berbicara mengenai pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan

pendapatan nasional. Menurut (Yuliana, 2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Tujuan utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketimpangan pendapatan rendah dapat dicapai namun keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan (Shin, 2012). Oleh karena itu demi mencapai tujuan dari pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik karena pada dasarnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki, dimana pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985 dalam Adyatma & Oktaviani, 2015). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut

PDRB (Jaya & Dwirandra, 2014). Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Kinerja perekonomian di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara dijelaskan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,12% dari tahun sebelumnya sebesar 5,18%. Hal ini disebabkan oleh “Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumut terutama perlambatan kinerja ekspor, khususnya antar daerah. Penurunan kinerja ekspor antar daerah terjadi sejalan dengan menurunnya produksi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Utara. Dari sisi penawaran, melambatnya perekonomian Sumut terutama didorong oleh penurunan kinerja kategori/sector pertanian dan kategori perdagangan” (sumber :www.bi.go.id).

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kecuali pada Kabupaten Batu Bara tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 4,11% dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi setiap tahun, Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nasution, 2017) menyatakan bahwa dari “pertumbuhan ekonomi kabupaten batu bara yang negatif, disebabkan PDRB Lapangan Usaha menurut harga berlaku dan harga konstan kabupaten batubara masih sedikit masyarakat memiliki indikator PDRB Lapangan Usaha menurut harga berlaku dan harga konstan seperti lahan pertanian, jasa pendidikan, infrastruktur sarana dan prasarana, dll sehingga minusnya angka PDRB Kabupaten Batubara belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batubara. Padahal Kabupaten Batubara memiliki infastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batubara karena dilihat dari pelabuhan Tanjung Tiram Kuala Tanjungnya semua barang eksport dan import serta bea cukai berlabuh ke Pelabuhan Tanjung Tiram Kuala Tanjung untuk melakukan perdangan nasional dan internasional”.

Kabupaten Gunungsitoli dan Kabupaten Padangsidempuan memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, sedangkan kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif tiap tahunnya.

Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64
2.	Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82
3.	Kab. Deli Serdang	5,32	5,1	5,15	5,18
4.	Kab. Tanah Karo	5,17	5,21	4,55	4,6
5.	Kab. Labuhan Batu	5,06	5	5,06	5,07
6.	Kab. Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07

7.	Kab. Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,3
8.	Kab. Nias	5,03	5,01	4,95	5,04
9.	Kab. Simalungun	5,4	5,13	5,18	5,2
10.	Kab. Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23
11.	Kab. Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,2	5,18
12.	Kab. Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62
13.	Kab. Toba Samosir	4,76	4,9	4,96	4,88
14.	Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51
15.	Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93
16.	Kota Pematang Siantar	4,86	4,41	4,8	4,82
17.	Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,2
18.	Kota Tanjung Balai	5,76	5,51	5,77	5,79
19.	Kota Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15
20.	Kota Padang Sidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51
21.	Kab. Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87
22.	Kab. Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03
23.	Kab. Humbang Hasundutan	5	5,02	5,04	4,94
24.	Kab. Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28
25.	Kab. Samosir	4,76	4,9	4,96	4,88
26.	Kab. Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35
27.	Kab. Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64
28.	Kab. Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	5,21	5,11	5,2	5,15
31.	Kab. Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65
32.	Kab. Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82
33.	Kota Gunung Sitoli	6,03	6,01	6,03	6,05
34.	Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22

Sumber : BPS, data diolah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2012). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut (Wertianti & Dwirandra, 2013) Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun

untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Wandira, 2013).

Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Wandira, 2013). Menurut (Mardiasmo, 2012) akan lebih baik jika alokasi belanja daerah pemda di daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal yang berorientasi publik, sebab sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah. Diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat kembali dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Waryanto, 2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan beberapa penelitian lain sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda diantaranya penelitian

yang dilakukan oleh Penelitian dilakukan oleh (Fajri, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “hal ini disebabkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah”. Hasil peneltian dari (Hakim, 2014) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi Belanja modal pemerintah yang terdiri dari belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Berikut merupakan tabel Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019.

Tabel 1.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Kab. Asahan	250.239.881.459	226.816.631.079	188.517.469.886	254.691.770.192
2.	Kab. Dairi	226.059.936.000	228.408.837.370	156.649.693.100	183.892.124.769
3.	Kab. Deli Serdang	763.542.419.284	647.202.906.037	697.679.038.693	888.436.518.377
4.	Kab. Karo	240.247.991.612	264.211.699.436	136.537.351.685	137.501.741.147
5.	Kab. Labuhanbatu	254.996.647.877	324.160.967.354	317.119.954.870	348.522.396.327
6.	Kab. Langkat	178.408.079.277	405.340.050.736	195.936.324.491	219.386.546.117
7.	Kab. Mandailing Natal	243.804.504.471	267.628.603.720	194.466.435.357	221.051.748.746
8.	Kab. Nias	276.204.194.234	232.139.893.948	200.870.227.906	99.053.914.610
9.	Kab. Simalungun	148.253.142.162	192.985.309.600	757.902.044.239	383.467.731.832
10.	Kab. Tapanuli Selatan	317.665.584.012	251.102.481.128	288.503.471.683	347.972.064.954
11.	Kab. Tapanuli Tengah	248.422.863.200	172.251.621.000	293.563.418.000	186.108.916.165
12.	Kab. Tapanuli Utara	256.894.018.413	153.059.693.043	175.999.699.890	199.595.162.428
13.	Kab. Toba Samosir	142.747.216.618	183.534.119.069	133.444.911.040	135.812.733.116
14.	Kota Binjai	216.693.784.259	180.664.010.530	212.612.965.741	78.230.946.876

15.	Kota Medan	1.190.129.261.883	1.352.895.789.273	1.168.438.057.824	1.234.065.029.448
16.	Kota Pematang Siantar	181.491.121.129	276.945.037.254	242.298.040.508	244.087.588.942
17.	Kota Sibolga	226.448.006.816	123.807.770.265	136.425.184.386	91.881.655.884
18.	Kota Tanjung Balai	125.335.848.153	139.514.566.774	265.955.906.139	245.414.198.941
19.	Kota Tebing Tinggi	199.694.754.287	193.474.228.020	204.916.760.708	137.722.333.330
20.	Kota Padang Sidempuan	94.047.288.910	173.100.590.753	110.303.399.100	138.867.721.951
21.	Kab. Pakpak Bharat	178.753.161.605	277.516.882.785	193.622.047.049	116.620.508.472
22.	Kab. Nias Selatan	252.958.317.315	185.452.720.555	218.057.679.776	289.127.118.413
23.	Kab. Humbang Hasundutan	222.583.277.580	215.016.186.683	168.058.004.851	212.002.434.356
24.	Kab. Serdang Bedagai	232.627.813.131	211.181.500.768	332.119.516.934	306.607.246.140
25.	Kab. Samosir	234.208.844.058	251.183.369.261	180.588.258.636	184.085.257.138
26.	Kab. Batu Bara	214.811.903.791	163.584.205.477	153.730.870.995	214.974.278.678
27.	Kab. Padang Lawas	218.812.790.859	247.447.832.079	193.354.568.263	238.599.146.045
28.	Kab. Padang Lawas Utara	252.138.556.030	284.894.717.644	202.600.721.974	243.120.417.064
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	268.353.355.409	227.492.997.052	240.180.979.974	208.775.702.194
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	94.863.210.600	74.592.574.628	93.507.955.524	188.471.594.700
31.	Kab. Nias Utara	290.513.038.243	278.410.747.276	212.637.857.820	234.129.159.841
32.	Kab. Nias Barat	235.002.707.831	221.099.949.150	261.221.757.722	232.590.437.162
33.	Kota Gunungsitoli	206.785.153.950	186.700.390.671	326.730.780.677	294.734.229.335
34.	sumatera utara	1.243.297.180.210	1.790.920.557.785	1.900.431.184.655	1.796.373.283.666

Sumber : Kemenkeu, data diolah

Dari tabel 1.2 dapat diketahui perkembangan kontribusi belanja modal tiap daerah berbeda dan berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar terdapat di kota medan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.352.895.789.273, sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 sebesar Rp. 74.592.574.628.

Alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006 Dalam Butar, 2013). Berkaitan dengan Pelayanan Publik, Alokasi Belanja Modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak Belanja Modal maka semakin tinggi pula produktivitas

perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur yang jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Butar, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing. Dalam era Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli

Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Siswiyanti, 2015). Hal ini senada dengan hasil penelitian oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga semakin tinggi.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Menurut (Mardiasmo, 2009) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Hasil penelitian sebelumnya oleh (Dewi & Suputra, 2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Yuliana (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2016) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Siswiyanti, 2015), (Putri, 2015), (Rori et al., 2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian sebelumnya berbeda yang dilakukan oleh (Paat et al., 2017) yang menyatakan bahwa

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar terdapat di Kota Medan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.338.282.166.448 , sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.540.000.000. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Kab. Asahan	104.816.667.737	107.890.187.769	121.707.607.044	138.454.325.244
2.	Kab. Dairi	75.647.999.000	66.344.330.338	101.426.328.300	86.180.996.000
3.	Kab. Deli Serdang	672.229.014.500	662.615.775.000	1.000.927.060.000	1.168.365.751.320
4.	Kab. Karo	92.659.298.184	104.000.000.000	147.750.976.065	105.471.698.094
5.	Kab. Labuhanbatu	161.886.178.261	163.989.690.295	180.542.687.295	197.779.176.200
6.	Kab. Langkat	115.313.351.000	131.076.423.284	144.050.847.030	151.480.847.030
7.	Kab. Mandailing Natal	85.508.994.820	100.111.769.563	117.661.769.563	120.128.557.818
8.	Kab. Nias	69.414.470.000	77.222.210.000	81.393.907.000	86.228.075.151
9.	Kab. Simalungun	119.980.274.859	213.789.585.400	661.815.202.074	193.509.084.000
10.	Kab. Tapanuli Selatan	90.666.249.315	81.435.846.816	110.678.075.237	138.751.607.368
11.	Kab. Tapanuli Tengah	64.005.291.000	72.369.935.497	100.000.000.000	115.002.518.000
12.	Kab. Tapanuli Utara	67.183.704.000	94.623.508.995	110.008.590.000	123.600.006.032
13.	Kab. Toba Samosir	37.451.580.462	44.367.570.060	50.147.346.275	57.065.708.000
14.	Kota Binjai	88.674.387.050	98.283.092.444	136.033.147.992	138.085.857.147
15.	Kota Medan	1.827.196.828.389	1.973.780.338.563	2.112.663.059.116	2.338.282.166.448
16.	Kota Pematang Siantar	111.207.722.002	116.508.915.582	128.188.366.612	119.600.219.323
17.	Kota Sibolga	65.159.344.084	78.454.412.503	108.129.370.832	114.280.407.534
18.	Kota Tanjung Balai	63.898.624.189	65.315.421.605	69.060.641.086	91.602.141.086
19.	Kota Tebing Tinggi	86.115.554.000	97.353.698.600	105.579.950.493	108.650.471.607
20.	Kota Padang Sidempuan	69.107.801.380	91.296.998.872	93.313.756.578	95.200.850.096
21.	Kab. Pakpak Bharat	15.235.186.682	24.297.176.000	28.169.647.917	21.286.888.500
22.	Kab. Nias Selatan	14.110.806.475	14.160.411.140	21.079.236.300	21.079.236.300

23.	Kab. Humbang Hasundutan	35.045.117.132	41.679.310.663	61.716.876.667	66.211.385.334
24.	Kab. Serdang Bedagai	89.259.943.520	102.479.860.648	219.156.984.000	126.502.015.000
25.	Kab. Samosir	30.786.029.967	50.000.000.000	54.289.357.980	57.343.457.195
26.	Kab. Batu Bara	50.426.644.624	51.590.500.000	63.225.916.173	90.410.759.184
27.	Kab. Padang Lawas	49.991.246.695	52.299.754.095	59.568.272.023	68.694.221.892
28.	Kab. Padang Lawas Utara	32.165.959.003	35.150.441.395	50.219.435.141	49.354.506.762
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542.000	41.169.542.000	57.290.705.012	59.064.372.777
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	35.326.053.722	43.182.972.000	51.069.120.952	56.772.355.964
31.	Kab. Nias Utara	28.000.000.000	32.005.000.000	71.897.203.571	12.540.000.000
32.	Kab. Nias Barat	24.000.000.000	28.740.000.000	50.000.000.000	17.721.453.072
33.	Kota Gunungsitoli	28.000.000.000	34.937.400.200	36.676.262.664	34.019.889.165
34.	sumatera utara	4.630.468.147.630	4.925.627.725.733	5.732.425.486.154	7.583.849.754.886

Sumber : Kemenkeu, data diolah

Berdasarkan pada tabel 1.2 dan 1.3 Dapat diketahui bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota tergolong sangat rendah dibanding belanja modal. Dari sisi pendapatan, keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung dari transfer dana perimbangan, sehingga kemandirian fiskal masih sangat kurang. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, rasio PAD terhadap pendapatan cenderung menurun, bahkan pada tahun 2017 kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercatat 18,7% (kategori kurang) (Sumber : www.bi.go.id). Menurut (Feronika et al., 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Butar, 2013) dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada

penelitian Butar Butar (2013) yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Selain itu penelitian ini menggunakan seluruh 33 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018 sebagai sampel penelitian, sedangkan penelitian Butar Butar (2013) menggunakan seluruh 14 kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006-2010.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Kabupaten Batu Bara menjadi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang paling terendah. Padahal, kabupaten Batu Bara memiliki infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tergolong sangat rendah. Sehingga kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat kurang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti hanya untuk menganalisis laporan realisasi APBD tahunan. Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ialah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis mengenai Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang ada di daerah.
2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi Pengembangan ilmu khususnya ilmu akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sumber inspirasi untuk memperdalam permasalahan Belanja Modal dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Siregar, 2015) pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah untuk membentuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam penyusunan APBD salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Menurut (Sukirno, 2011) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu :

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya

pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Samuelson, 2004 Dalam Rofii & Ardyan, 2017), ada empat roda atau faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain :

1. Sumberdaya Manusia Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barangbarang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang (mandays) maupun jam kerja orang (manhours). Dapat saja terjadi jumlah orang yang bekerja tetap tetapi jumlah hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu diketahui bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Teori ekonomi telah menemukan bahwa kemauan

seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan dan keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat kecakapan, keterampilan dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun nonformal seperti latihan-latihan kerja.

2. Sumberdaya alam yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam ini diantaranya tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumberdaya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Namun, pemilikan sumberdaya alam bukan merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Ada pula negara-negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri. Hal ini dikarenakan adanya pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal.
3. Pembentukan modal akumulasi modal selalu menghendaki pengorbanan konsumsi pada saat ini selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negaranegara dengan pertumbuhan paling pesat, 10-20 persen output akan masuk dalam pembentukan modal bersih.

4. Perubahan Teknologi dan Inovasi Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi, komputasi, komunikasi dan sains kehidupan. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya, inovasi yang cepat memerlukan pemupukan semangat kewirausahaan.

2.1.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut (Rahardja, Pratama dan Manurung, 2008) mengemukakan bahwa “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”.

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985 Dalam Adyatma, 2015).

Penelitian Terdahulu (Adyatma, 2015) menyatakan bahwa peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2015). Hal ini sejalan dengan (Bapenas, 2003 Dalam Maryati, 2010) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB. Angka PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Berarti untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB atas harga konstan. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2015). Berikut ini adalah rumus menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi :

$$G = \frac{\text{PDRB1} - \text{PDRB 0}}{\text{PDRB 0}} \times 100\%$$

Dimana :

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada satu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Menurut (Erlina, 2013) menyebutkan bahwa belanja modal adalah :

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut (Deddi, 2010) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Menurut (Halim, 2011) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut (Siregar, 2015) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset

tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2.2 Macam-Macam Belanja Modal

Menurut (Wertiant dan Dwirandra, 2013) yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan

perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian,

peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Berdasarkan Penelitian terdahulu (Yasin & Kasino, 2018) mengemukakan bahwa pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat.

Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah dan Dengan bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Dan Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi juga akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJII$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJII : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Rori et al., 2016) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut (Anggoro & Alfandia, 2018) pendapatan asli daerah (PAD) adalah PAD merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat

PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Menurut (Siregar, 2017) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut (Hanum, 2011) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002 Dalam Jolianis, 2012) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut.

menurut undang undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Pendapatan Asli Daerah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini Menurut (Nugroho&Rohman, 2012) dapat di hitung dengan rumus :

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1) Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2016), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dibal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak.

Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaannya diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan bendayang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalulintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak ataspemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahandi Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.

- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerahdilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidakdipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakandaerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutandaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan. Menurut (Halim, 2016), retribusi daerah merupakanpendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.Menurut (Syahputra, 2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak.Pembatas utama bagi sektor retribusiadalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah.Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain

yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

1) Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah

cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

2) Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi

dampaknegatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut (Halim, 2016), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyekpendapatan mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut (Halim, 2016), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuanganbank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Dalam (Mardiasmo, 2013), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut (Halim, 2016), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.

- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.3.5 Potensi Peningkatan PAD

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberikeleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Mardiasmo, 2013), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan

sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, *lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusidaerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Review Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wardiah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2.	Arini S (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di pulau Kalimantan	Variabel Independen : Belanja Modal Alokasi Umum, Dependen : pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau kalimantan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan masyarakat
3.	Utami & Indrajaya (2019)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Bali	Variabel Independen : PAD dan Belanja Mdoal Variabel Independen : pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. Sedangkan Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

				kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.
4.	Putra (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
5.	Fajri (2016)	Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera	Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera
6.	Sularso&Restianto (2011)	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Variabel Independen : Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD Derajat Kontribusi BUMD Variabel Dependen : Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan berupa Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD Derajat Kontribusi BUMD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal tetapi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Alokasi Belanja Modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah. Pengaruh tidak langsung terbesar dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan

				ekonomi adalah efektifitas PAD.
7.	Sulaeman & Silvia (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Regional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8.	Putri (2015)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen : PAD, DAU dan Inflasi Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan PAD, DAU dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
9.	Priambodo (2014)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012	Variabel Independen : PAD, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tenaga Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji F-statistik (uji simultan) didapati bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
10.	Rori, et. al	Analisis Pengaruh	Variabel	Hasil penelitian

	(2018)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013	Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 – 2013. Secara teori apabila PAD naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan ikut naik.
--	--------	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian terdahulu (Arini S, 2019) mengemukakan bahwa Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dokumen anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. sementara belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam APBN atau APBD dengan tujuan kepentingan masyarakat. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Gunantara & Dwirandra, 2014) menyatakan bahwa :“Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat mendukung peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”.

sehingga berdasarkan penelitian (Arini S, 2016), (Sularso&Restianto, 2011) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaya, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi, hal ini senada dengan penelitian oleh Putra (2016), Waryanto (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang yang berarti bahwa jika belanja modal naik, maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) menunjukkan hasil penelitian belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan oleh (Islamiah, 2015), menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian terdahulu Rori, et. al (2016) menyatakan bahwa : “Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya”.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Sulaeman & Silvia, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendriwiyanto (2014) yang menyatakan bahwa “semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya”. (Setiyawati & Hamzah, 2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Setiyawati & Hamzah, 2007) mengungkapkan bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2015) menunjukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Kusumawati & Wiksuana (2018) menunjukkan bahwa peningkatan PAD mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian (Jolianis, 2016) Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni et al., 2013), Setyawati & Hamzah (2007), Maryanti & Endrawati (2010), Rori et, al (2016) .berbeda dengan hasil penelitian oleh (Paat et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif atau

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.3 Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). (Todaro, 2000 Dalam Dewi & Syahputra, 2017) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh (Wardhiah, 2019) bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian (Nopiani,2017), Mawarni dkk., (2013) dan Putri (2015), Utami & Indrajaya (2019), (Priambodo, 2014).Hal yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Syaputra, 2017),(Jannah & Nasir, 2018)yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

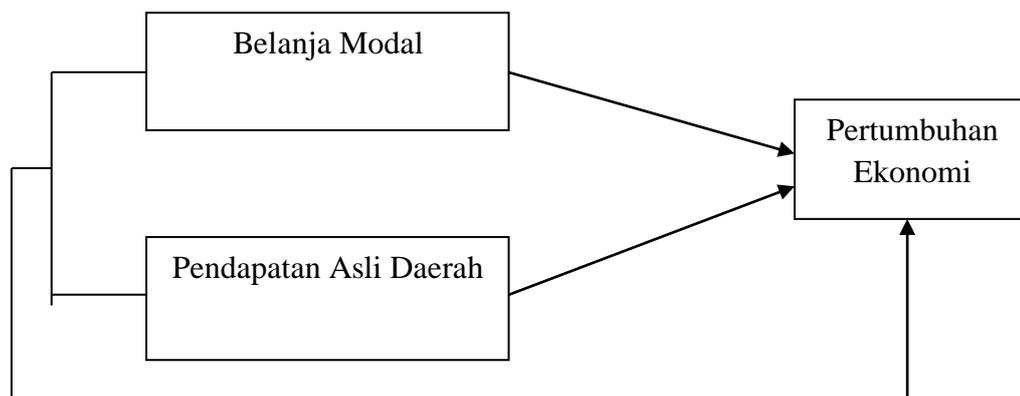
Selanjutnya dalam peneltian ini, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.dikarenakan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priambodo (2015) dan menyimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi . sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi, Para peneliti terdahulu lainnya juga menghasilkan pendapat yang sama yaitu penelitian (Nurmainah, 2019), Utami & Indrajaya (2019), Yuliana (2014). Utama dan Ismawati (2018) melakukan penelitian menggunakan analisis dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun Kerangka Berfikir, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H1 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H3 : Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah Penelitian yang menekankan analisis pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode stastistika (Azwar, 2010). Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)(X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1) Belanja Modal (X1)

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang

bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Aditya et al., 2018). Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik (Jaeni, 2016)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pengukuran variabel Belanja Modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Dimana :

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJIJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut (Siskawati, 2014, Hal. 198). Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD, semakin besar sumbangan yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Fawaidurrohman et al., 2019, Hal. 91).

Menurut (Yusuf et al., 2014), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.keseluruhan bagian penerimaan tersebut

setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu mengali sumber-sumber keuangan secara maksimal. Namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan asli daerah. Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Menurut (Pratama, 2013) PAD dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) (Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2012:61) variabel dependen pada penelitian ini adalah:

1) Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Rofii & Ardyan, 2017, Hal. 303)

Pengukuran variabel Pertumbuhan Ekonomi ini diukur dengan skala rasio. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2015)

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan perhitungan :

$$G = \frac{\text{PDRB1} - \text{PDRB 0}}{\text{PDRB 0}} \times 100\%$$

Dimana :

G = laju pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat jelas dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Defenisi Variabel Operasional

No.	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Belanja Modal (X1)	belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010)	BM = BT + BPM + BGB + BJJ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010)	Rasio
2.	Pendapatan Asli Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang	PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS (Pratama, 2013)	Rasio

		<p>dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah</p> <p>(Wulandari & Iryanie, 2018, Hal. 23)</p>		
3.	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat</p> <p>(rofii & Ardyan, 2017, Hal. 303).</p>	$G = \frac{\text{PDRB1} - \text{PDRB 0}}{\text{PDRB 0}} \times 100\%$ <p>(Badan Pusat Statistik, 2015)</p>	Rasio

Sumber : Data yang diolah oleh penulis

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang tercatat di Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengakses *website* Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.kemenkeu.go.id dan

www.sumut.bps.go.id. Penelitian ini di mulai pada bulan maret 2020 hingga bulan April 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul dan persiapan bahan materi	■															
2	Penyusunan proposal	■	■														
3	Bimbingan Proposal		■	■	■												
4	Seminar proposal					■											
5	Pengumpulan dan pengolahan data						■	■	■								
6	Penyusunan skripsi									■	■	■	■				
7	Pembimbingan skripsi												■	■	■		
8	Sidang meja hijau															■	■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama priode 2016-2019.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Sampling jenuh yaitu sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Perimbangan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera

2. Kabupaten/Kota mencantumkan data-data mengenai Belanja Modal dan PAD pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Kabupaten/Kota tercatat PDRB atas harga konstan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019

Berdasarkan Proses pemilihan sampel menggunakan metode Sampling Jenuh dengan kriteria diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3 Daftar sampel penelitian

No.	NAMA KAB/KOTA	KRETERIA			SAMPEL
		1	2	3	
1	Asahan	√	√	√	1
2	Dairi	√	√	√	2
3	Deli serdang	√	√	√	3
4	Tanah karo	√	√	√	4
5	Labuhan Batu	√	√	√	5
6	Langkat	√	√	√	6
7	Mandailing Natal	√	√	√	7
8	Nias	√	√	√	8
9	Simalungun	√	√	√	9
10	Tapanuli Selatan	√	√	√	10
11	Tapanuli Tengah	√	√	√	11
12	Tapanuli Utara	√	√	√	12
13	Toba Samosir	√	√	√	13
14	Binjai	√	√	√	14
15	Medan	√	√	√	15
16	Pematang Siantar	√	√	√	16
17	Sibolga	√	√	√	17
18	Tanjung Balai	√	√	√	18
19	Tebing Tinggi	√	√	√	19
20	Padang Sidempuan	√	√	√	20
21	Pakpak Bharat	√	√	√	21
22	Nias Selatan	√	√	√	22
23	Humbang Hasundutan	√	√	√	23
24	Serdang Bedagai	√	√	√	24
25	Samosir	√	√	√	25
26	Batu Bara	√	√	√	26
27	Padang Lawas	√	√	√	27
28	Padang Lawas Utara	√	√	√	28
29	Labuhan Batu Selatan	√	√	√	29
30	Labuhan Batu Utara	√	√	√	30
31	Nias Utara	√	√	√	31
32	Nias Barat	√	√	√	32
33	Gunung Sitoli	√	√	√	33

Sumber : Data yang diolah oleh penulis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data dari website Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id) . dimana kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mencari data langsung dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Data sekunder yang diperlukan terdiri dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2019 dapat diperoleh data mengenai jumlah Belanja Modal dan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari Website Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan. Sedangkan data mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini model dan tehnik analisa data menggunakan pendekatan regresi linier berganda dan regresi dengan variabel moderating. Sebelum menganalisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi

klasik, yang diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model analisa regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Model satu menguji hipotesis 1,2, dan 3 :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
β_0	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien regresi
X_1	= Belanja Modal
X_2	= Pendapatan Asli Daerah
e	= Error

Pengujian model regresi yang berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif dari masing-masing variabel bebas belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi, agar regresi berganda dapat digunakan, maka terdapat kriteria-kriteria dalam asumsi klasik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, hal ini untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah

terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linear berganda dapat digunakan. Uji asumsi klasik berganda dapat bertujuan untuk menganalisis apakah model yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka data dianalisis layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau tujuan pemecahan masalah praktis. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi, dan multikolinieritas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Setelah data diuji dengan reliabilitas dan validitas, maka data tersebut diuji normalitasnya, yaitu untuk menentukan alat statistik yang digunakan, jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan variansinya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan alat statistik parametrik., jika data yang diperoleh tidak terdistribusi normal dan atau variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik non parametrik. Menurut (Ghozali, 2013) bahwa “Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat grafik penyebaran data dan uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Jika tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal.

1.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel independen. Multikolinieritas terjadi karena adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas (X) dalam model regresi.

Uji multikolinieritas juga terdapat beberapa ketentuan, (Ghozali, 2013) yaitu:

- 1) Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas
- 2) Bila $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas
- 3) Bila $Tolerance > 0,1$, maka tidak terjadi multikolinieritas
- 4) Bila $Tolerance < 0,1$, maka terjadi multikolinieritas

1.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Menurut (Ghozali, 2013), jika ada pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan memilih berdasarkan masukan dari variabel bebasnya.

1.6.2.4 Uji Autokolerasi

Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokolerasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) menurut (Ghozali, 2013):

- 1) Jika D-W dibawah -2 berarti autokolerasi positif

- 2) Jika D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokolerasi
- 3) Jika D-W diatas +2 berarti ada autokolerasi pnegative

1.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji t)

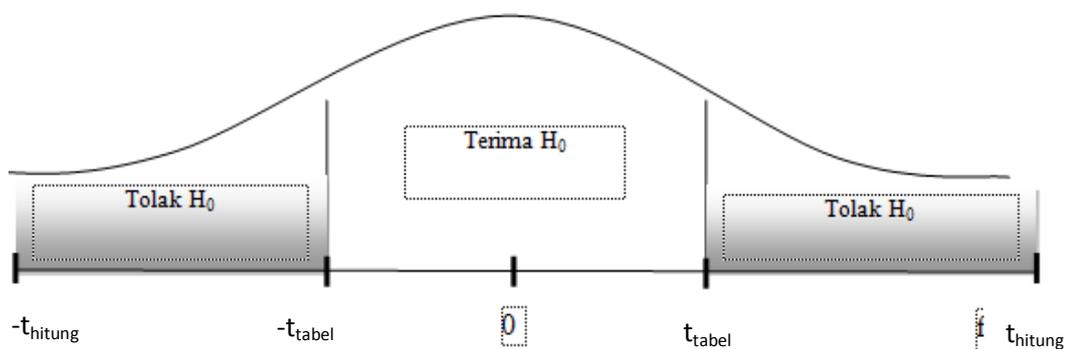
Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dimana uji t mencari t_{hitung} dan membandingkan dengan t_{tabel} apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Adapun pengujiannya sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$
- 2) Terima H_0 apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$



Gambar III.1 Kriteria Pengujian Hipotesis

3.6.3.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis kedua. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi level taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$) (Sugiyono, 2012) dengan rumus :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

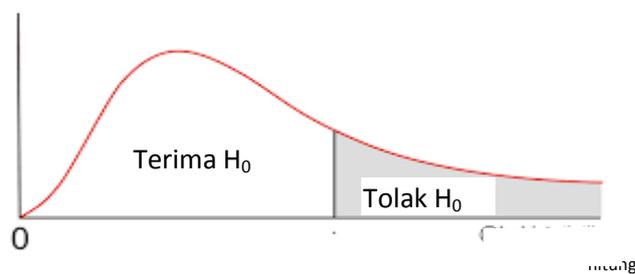
Kriteria Pengujian hipotesis yaitu:

Ho: $\beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak Ho apabila $F_{hitung} \geq F_{table}$ atau $-F_{hitung} \leq -F_{table}$
- 2) Terima Ho apabila $F_{hitung} < F_{table}$ atau $-F_{hitung} > -F_{table}$



Gambar III-2. Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)

3.6.4 Uji Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2012) rumus untuk mengukur besarnya proporsi adalah:

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Dimana: KD = Koefisien Determinan.

R = Nilai korelasi berganda

100% = Persentase kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. sedangkan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.bps.sumut.go.id>

4.1.2 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas X1 (Belanja Modal)

Belanja Modal adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

2. Variabel Bebas X2 (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Variabel Terikat Y (Pertumbuhan Ekonomi)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

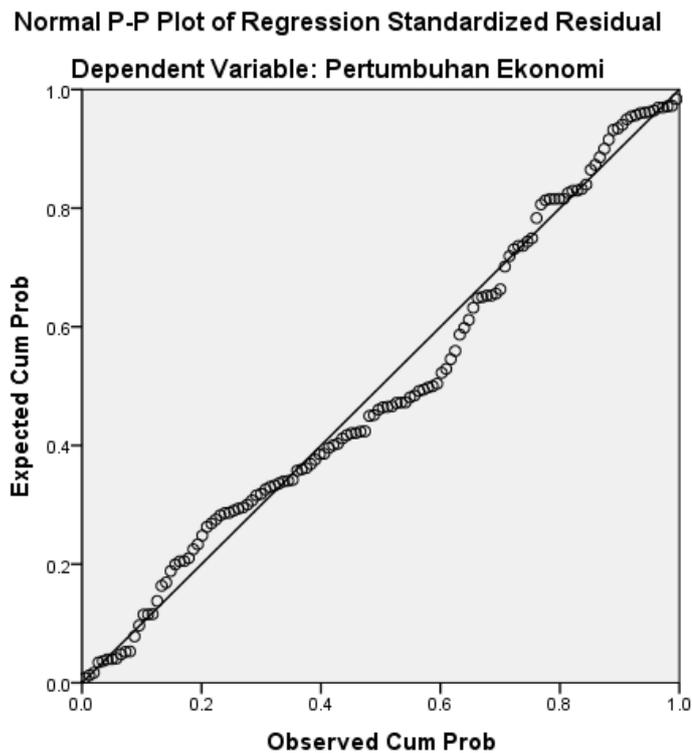
Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Dalam menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas digunakan 2 cara antara lain sebagai berikut :

a. P-Plot Regression

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot berikut ini:



**Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot
 Regression Standardized Residual**

Pada gambar IV.1 hasil dari pengaruh normalitas data menunjukkan bahwa pada grafik normal plot terlihat titik – titik menyebar mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal, sehingga layak digunakan.

b. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Modal	PAD	Pertumbuhan Ekonomi
N		132	132	132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.2635	3.2635	5.1902
	Std. Deviation	.01903	.01903	.46381
Most Extreme Differences	Absolute	.152	.152	.112
	Positive	.152	.152	.112
	Negative	-.098	-.098	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.749	1.749	1.284
Asymp. Sig. (2-tailed)		.587	.900	.995

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai K-S variable Belanja Modal, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi telah berdistribusi secara normal karena masing – masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym.Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	.402	6.380					
1 Belanja Modal	4.997	5.430	.026	.037	.023	.996	1.004
PAD	.573	3.189	.789	.789	.789	.996	1.004

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

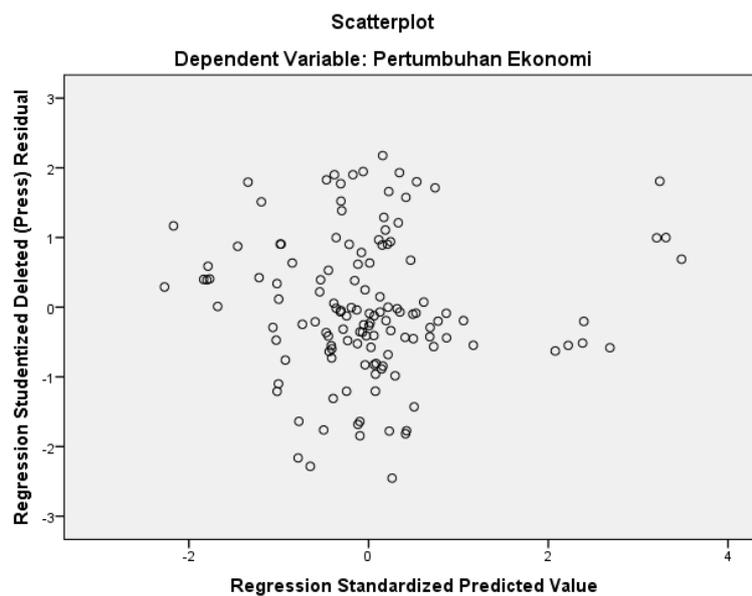
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Belanja Modal(X_1) sebesar 1.004 dan variabel PAD (X_2) sebesar 1.004. Dari masing-masing variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 10. Demikian juga nilai *Tolerance* pada variabel Belanja Modal (X_1) sebesar 0,996 dan PAD (X_2) sebesar 0,996. Dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang di indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode *Scatterplot*.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke- t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- 1) Jika nilai D-W di bawah -2, maka ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W di atas +2, maka ada autokorelasi negatif.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan hasil uji autokorelasi pada data yang telah diolah :

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.623	5.788	2	7	.033	1.472

a. Predictors: (Constant), PAD, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1,472 yang berarti nilai D-W berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson tersebut tidak ada autokorelasi.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi = Nilai yang di prediksi

α = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi

X_1 = Belanja Modal

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

e = error

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	9.011	.588	
1 Belanja Modal	.847	.494	.499
PAD	.881	.553	.790

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 9,011 + 0,847 + 0,881$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 9,011 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Belanja Modal (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) bernilai nol, maka

Pertumbuhan Ekonomi (Y) Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019 bernilai 9,011.

- 2) Nilai Belanja Modal (X_1) sebesar 0,847. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Belanja Modal ditingkatkan 100% maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 84,7% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar 0,881. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan 100% maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 88,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.011	.588		9.019	.000
1 Belanja Modal	.847	.494	.499	2.314	.022
PAD	.881	.553	.790	3.401	.011

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk pengaruh antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai t_{tabel} untuk $n = 132 - 2 = 130$ adalah 1,656.

1) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah belanja modal secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan Ekonomi. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

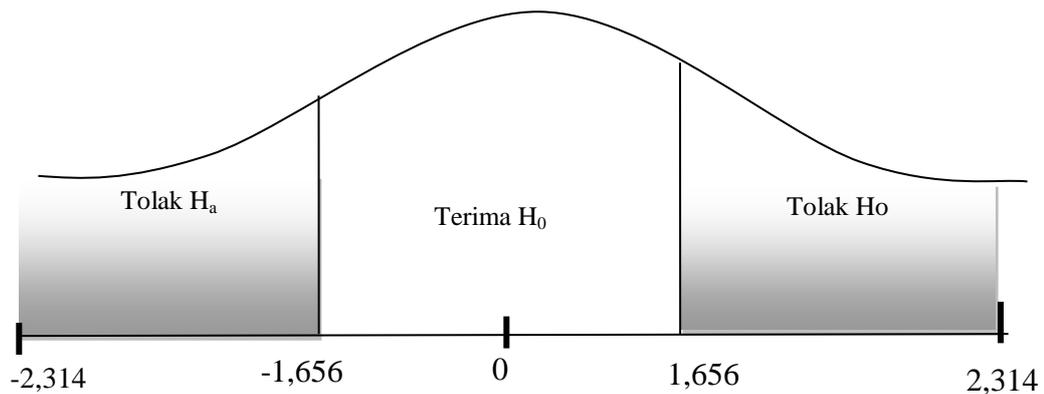
$$t_{\text{hitung}} = 2,314$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,656$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-1,656 \leq t_{\text{hitung}} \leq 1,656$, pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > 1,656$ atau $-t_{\text{hitung}} < -1,656$



Gambar 4.4
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Belanja Modal sebesar 2,314 dan t_{tabel} sebesar 1,656. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,314 > 1,656$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai t_{hitung} sebesar 2,314 dengan arah hubungan yang positif antara Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Belanja Modal diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

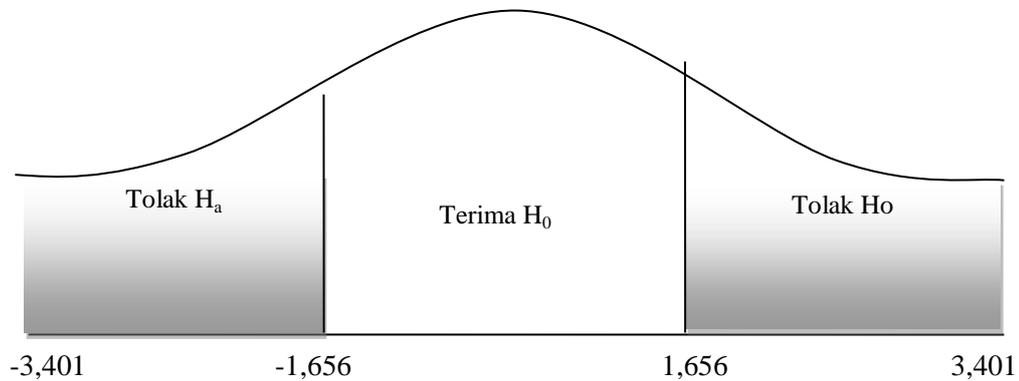
$$t_{\text{hitung}} = 3,401$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,656$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-1,656 \leq t_{hitung} \leq 1,656$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 1,656$ atau $-t_{hitung} < -1,656$



Gambar 4.3
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah 3,401 dan t_{tabel} sebesar 1,656. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,401 > 1,656$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai t_{hitung} sebesar 3,401 dengan arah hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya pendapatan asli daerah diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Be;anja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.115	2	1.115	5.354	.022 ^b
	Residual	27.066	130	.208		
	Total	28.181	132			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), PAD, Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

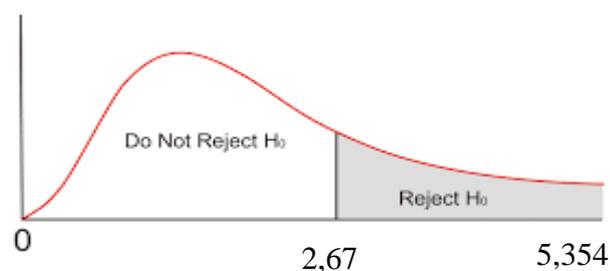
Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 5,354$$

$$F_{tabel} = n-k-1 = 132-2-1 = 129$$

$$F_{tabel} = 2,67$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 129$ adalah sebesar 2,67. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 2,67 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.5
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh F_{hitung} sebesar 5,354 dengan F_{tabel} sebesar 2,67 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($5,354 > 2,67$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan kata lain Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi secara langsung.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.789 ^a	.623	.516	.45470	.623	5.788	2	7	.033	1.472

a. Predictors: (Constant), PAD, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai R adalah 0,789. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0,789^2 \times 100 \% \\ &= 62,3 \% \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 62,3 % hal ini berarti bahwa 62,3 % variasi nilai pertumbuhan ekonomiditentukan oleh peran dari variasi nilai Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain kontribusi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerahadalah sebesar 62,3% sedangkan sisanya 37,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 3 bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sumatera Utara Periode

2016-2019 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,314 > 1,656$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Menurut (Halim, 2016) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja asset lainnya.

Pentingnya penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan dapat terpenuhi.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu

pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara dengan nilai signifikan $0,022 < 0,05$. Walaupun signifikan namun Provinsi Sumatera Utara memiliki fenomena pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Pertumbuhan ekonomi eksklusif dapat terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas atau belum merata atau bisa jadi disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam belanja modal namun tidak disertai dengan menurunnya angka kemiskinan atau pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan Kabupaten Batu Bara menjadi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang paling terendah. Padahal, kabupaten Batu Bara memiliki infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung. Namun pemerintah memberi perhatian khusus sehingga daerah masih memiliki peluang untuk berkembang lebih baik lagi. Maka dari hasil yang diperoleh dan analisis hasil dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi diterima.

Hasil penelitian (Arini S, 2016), (Sularso&Restianto, 2011) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaaya, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini senada dengan penelitian oleh Alexiou (2009), Putra (2016), Waryanto (2017) bahwa

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang yang berarti bahwa jika belanja modal naik, maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) menunjukkan hasil penelitian belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan oleh (Islamiah, 2015), menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,401 > 1,656$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.

Adapun makna dari temuan tersebut adalah PAD memiliki peran yang penting didalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD maka akan semakin meningkatkan presentase pertumbuhan ekonomi daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Utara dan sebaliknya apabila

PAD mengalami penurunan dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran (Saptaningsih, 2009). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar, 2013).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2014). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya PEMDA lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. Oleh karena PAD harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi maka daerah tidak akan berhasil bila tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti walaupun adanya kenaikan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka ada indikasi adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan produktifitas masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengembangkan ekonominya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara global baik di daerah maupun secara nasional. Senada dengan (Barata, 2014) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2015) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Kusumawati & Wiksuana (2018) menunjukkan bahwa peningkatan PAD mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian (Jolianis, 2016) Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni et al., 2013), Setyawati & Hamzah (2007), Maryanti & Endrawati (2010), Rori et, al (2016) . berbeda dengan hasil penelitian oleh (Paat et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 5,354 dengan tingkat signifikan sebesar 0,022, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,67. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,354 > 2,67$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Besarnya pengaruh mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019 sebesar 62,3% sedangkan sisanya 37,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhiah, 2018) dengan judul penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan BelanjaModal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD, Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Ada hubungan yang positif antara masing-masing variabel. Artinya semakin tinggi tingkat penerimaan PAD akan meningkatkan Alokasi belanja modal juga akan tinggi yang akan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.
2. Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.
3. Ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 62,3% artinya menunjukkan bahwa sekitar 62,3% variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dan sisanya 37,7% pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dan juga stake holders yang berhubungan dalam pengalokasian anggaran sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran belanja modal tidak hanya pada bangunan fisik atau infrastruktur yang sifatnya baku, melainkan dapat mengalokasikan belanja modal pada sektor yang sifatnya produktif dan dapat berkembang dari tahun ketahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka pemerintah harus bisa mengoptimalkan dari segi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Daerah harus bisa terus menggali potensi daerah dan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Guna meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pusat. Guna meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan optimalnya usaha-usaha produktif yang dapat menjadikan nilai barang dan jasa akhir tinggi.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperlebar interval data time seriesnya dan menambah sampel yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih serta waktu penelitian hendaknya lebih panjang sehingga kelihatan kecenderungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2012). *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*. XXI(1), 1–19.
- Aditya, Dina Mei Eka, & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Prosiding SENDI_U 2018*, 33, 631–639.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Anggoro, D. D., & Alfandia, N. S. (2018). *Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah*. 13–23.
- Arini S, P. R. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Swasta Di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervering. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 5(1), 28–38.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Butar, S. J. B. (2013). *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. 1(1).
- Deddi, N. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Jakarta. Salemba Empat.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuh Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan. Brama Ardian.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Fawaidurrohman, A., Askanda, N. S., & Afifudin. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli DAerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahn 2014-2018. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(11), 87–103.
- Feronika, B., Rumat, V. A., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh pendapatan

- Asli Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(2), 1–17.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program spss*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. . (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 529–546.
- Hakim, L. (2014). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 3(1).
- Halim, A. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ketiga)*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Berdagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(02).
- Hutami, A., & Mursalim. (2018). *Pengaruh Aktivitas, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Deviden pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 21–32.
- Jaeni, G. A. L. (2016). *Perumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. 7(2005), 692–702.
- Jannah, K., & Nasir, M. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 3(2), 248–255.
- Jaya, P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- Jolianis. (2012). Analisis Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 1(1), 43–65.
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 193–216.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592–2620.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi Publisher.
- Maryati, U. E. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat*.
- Mawarni, Dawarnis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 80–90.
- Nasution, M. (2017). *Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara*.
- Nurmainah, S. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Paat, D. C., A.M.Koleangan, R., & Rumat, V. A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap Kemiskinan di kota Bitung*. 1–10.
- Pratama, H. A. (2013). *Analisis Pngaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah dengan Periode 2010-2012*.
- Priambodo, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(3), 427–435.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 173–186.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro* (Keempat). Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di jawa timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 303–316.

- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.
- Shin, I. (2012). Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 29(5), 2049–2057.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Pertama)*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Kedua)*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Siskawati, N. (2014). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah antar kabupaten/kota di provinsi Riau. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2), 197–206.
- Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belaja modal sebagai variabel intervening. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–17.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfa Beta.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar (Pertama)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). *Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap PERTumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. 4(1), 97–112.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Petumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124.
- Utami, D. N., & Indrajaya, G. B. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 45–51.
- Wardhiah. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 61–70.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Petumbuhan Ekonomi Di

- Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2(1), 35–55.
- Wayan, N., Dewi, N., Kembar, M., & Budhi, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Langsung Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP*, 4(11), 1391–1420.
- Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.
- Yasin, M., & Kasino. (2018). Analisis Pengaruh Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kinerja KEuangan Daerah di kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(2), 777–790.
- Yuliana. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal AKuntansi & Keuangan*, 5(1), 33–48.
- Yusuf, M. S., Sjamsuddin, S., & Domai, T. (2014). Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli DAerah Kabupaten Gresik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 550–556.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TABEL LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64
2.	Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82
3.	Kab. Deli Serdang	5,32	5,1	5,15	5,18
4.	Kab. Tanah Karo	5,17	5,21	4,55	4,6
5.	Kab. Labuhan Batu	5,06	5	5,06	5,07
6.	Kab. Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07
7.	Kab. Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,3
8.	Kab. Nias	5,03	5,01	4,95	5,04
9.	Kab. Simalungun	5,4	5,13	5,18	5,2
10.	Kab. Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23
11.	Kab. Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,2	5,18
12.	Kab. Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62
13.	Kab. Toba Samosir	4,76	4,9	4,96	4,88
14.	Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51
15.	Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93
16.	Kota Pematang Siantar	4,86	4,41	4,8	4,82
17.	Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,2
18.	Kota Tanjung Balai	5,76	5,51	5,77	5,79
19.	Kota Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15
20.	Kota Padang Sidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51
21.	Kab. Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87
22.	Kab. Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03
23.	Kab. Humbang Hasundutan	5	5,02	5,04	4,94
24.	Kab. Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28
25.	Kab. Samosir	4,76	4,9	4,96	4,88
26.	Kab. Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35
27.	Kab. Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64
28.	Kab. Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	5,21	5,11	5,2	5,15
31.	Kab. Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65
32.	Kab. Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82
33.	Kota Gunung Sitoli	6,03	6,01	6,03	6,05

Lampiran 2

TABEL BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Kab. Asahan	104.816.667.737	107.890.187.769	121.707.607.044	138.454.325.244
2.	Kab. Dairi	75.647.999.000	66.344.330.338	101.426.328.300	86.180.996.000
3.	Kab. Deli Serdang	672.229.014.500	662.615.775.000	1.000.927.060.000	1.168.365.751.320
4.	Kab. Karo	92.659.298.184	104.000.000.000	147.750.976.065	105.471.698.094
5.	Kab. Labuhanbatu	161.886.178.261	163.989.690.295	180.542.687.295	197.779.176.200
6.	Kab. Langkat	115.313.351.000	131.076.423.284	144.050.847.030	151.480.847.030
7.	Kab. Mandailing Natal	85.508.994.820	100.111.769.563	117.661.769.563	120.128.557.818
8.	Kab. Nias	69.414.470.000	77.222.210.000	81.393.907.000	86.228.075.151
9.	Kab. Simalungun	119.980.274.859	213.789.585.400	661.815.202.074	193.509.084.000
10.	Kab. Tapanuli Selatan	90.666.249.315	81.435.846.816	110.678.075.237	138.751.607.368
11.	Kab. Tapanuli Tengah	64.005.291.000	72.369.935.497	100.000.000.000	115.002.518.000
12.	Kab. Tapanuli Utara	67.183.704.000	94.623.508.995	110.008.590.000	123.600.006.032
13.	Kab. Toba Samosir	37.451.580.462	44.367.570.060	50.147.346.275	57.065.708.000
14.	Kota Binjai	88.674.387.050	98.283.092.444	136.033.147.992	138.085.857.147
15.	Kota Medan	1.827.196.828.389	1.973.780.338.563	2.112.663.059.116	2.338.282.166.448
16.	Kota Pematang Siantar	111.207.722.002	116.508.915.582	128.188.366.612	119.600.219.323
17.	Kota Sibolga	65.159.344.084	78.454.412.503	108.129.370.832	114.280.407.534
18.	Kota Tanjung Balai	63.898.624.189	65.315.421.605	69.060.641.086	91.602.141.086
19.	Kota Tebing Tinggi	86.115.554.000	97.353.698.600	105.579.950.493	108.650.471.607
20.	Kota Padang Sidempuan	69.107.801.380	91.296.998.872	93.313.756.578	95.200.850.096
21.	Kab. Pakpak Bharat	15.235.186.682	24.297.176.000	28.169.647.917	21.286.888.500
22.	Kab. Nias Selatan	14.110.806.475	14.160.411.140	21.079.236.300	21.079.236.300
23.	Kab. Humbang Hasundutan	35.045.117.132	41.679.310.663	61.716.876.667	66.211.385.334
24.	Kab. Serdang Bedagai	89.259.943.520	102.479.860.648	219.156.984.000	126.502.015.000
25.	Kab. Samosir	30.786.029.967	50.000.000.000	54.289.357.980	57.343.457.195
26.	Kab. Batu Bara	50.426.644.624	51.590.500.000	63.225.916.173	90.410.759.184
27.	Kab. Padang Lawas	49.991.246.695	52.299.754.095	59.568.272.023	68.694.221.892
28.	Kab. Padang Lawas Utara	32.165.959.003	35.150.441.395	50.219.435.141	49.354.506.762
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542.000	41.169.542.000	57.290.705.012	59.064.372.777
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	35.326.053.722	43.182.972.000	51.069.120.952	56.772.355.964
31.	Kab. Nias Utara	28.000.000.000	32.005.000.000	71.897.203.571	12.540.000.000
32.	Kab. Nias Barat	24.000.000.000	28.740.000.000	50.000.000.000	17.721.453.072
33.	Kota Gunungsitoli	28.000.000.000	34.937.400.200	36.676.262.664	34.019.889.165

Lampiran 3

TABEL PAD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Kab. Asahan	104.816.667.737	107.890.187.769	121.707.607.044	138.454.325.244
2.	Kab. Dairi	75.647.999.000	66.344.330.338	101.426.328.300	86.180.996.000
3.	Kab. Deli Serdang	672.229.014.500	662.615.775.000	1.000.927.060.000	1.168.365.751.320
4.	Kab. Karo	92.659.298.184	104.000.000.000	147.750.976.065	105.471.698.094
5.	Kab. Labuhanbatu	161.886.178.261	163.989.690.295	180.542.687.295	197.779.176.200
6.	Kab. Langkat	115.313.351.000	131.076.423.284	144.050.847.030	151.480.847.030
7.	Kab. Mandailing Natal	85.508.994.820	100.111.769.563	117.661.769.563	120.128.557.818
8.	Kab. Nias	69.414.470.000	77.222.210.000	81.393.907.000	86.228.075.151
9.	Kab. Simalungun	119.980.274.859	213.789.585.400	661.815.202.074	193.509.084.000
10.	Kab. Tapanuli Selatan	90.666.249.315	81.435.846.816	110.678.075.237	138.751.607.368
11.	Kab. Tapanuli Tengah	64.005.291.000	72.369.935.497	100.000.000.000	115.002.518.000
12.	Kab. Tapanuli Utara	67.183.704.000	94.623.508.995	110.008.590.000	123.600.006.032
13.	Kab. Toba Samosir	37.451.580.462	44.367.570.060	50.147.346.275	57.065.708.000
14.	Kota Binjai	88.674.387.050	98.283.092.444	136.033.147.992	138.085.857.147
15.	Kota Medan	1.827.196.828.389	1.973.780.338.563	2.112.663.059.116	2.338.282.166.448
16.	Kota Pematang Siantar	111.207.722.002	116.508.915.582	128.188.366.612	119.600.219.323
17.	Kota Sibolga	65.159.344.084	78.454.412.503	108.129.370.832	114.280.407.534
18.	Kota Tanjung Balai	63.898.624.189	65.315.421.605	69.060.641.086	91.602.141.086
19.	Kota Tebing Tinggi	86.115.554.000	97.353.698.600	105.579.950.493	108.650.471.607
20.	Kota Padang Sidempuan	69.107.801.380	91.296.998.872	93.313.756.578	95.200.850.096
21.	Kab. Pakpak Bharat	15.235.186.682	24.297.176.000	28.169.647.917	21.286.888.500
22.	Kab. Nias Selatan	14.110.806.475	14.160.411.140	21.079.236.300	21.079.236.300
23.	Kab. Humbang Hasundutan	35.045.117.132	41.679.310.663	61.716.876.667	66.211.385.334
24.	Kab. Serdang Bedagai	89.259.943.520	102.479.860.648	219.156.984.000	126.502.015.000
25.	Kab. Samosir	30.786.029.967	50.000.000.000	54.289.357.980	57.343.457.195
26.	Kab. Batu Bara	50.426.644.624	51.590.500.000	63.225.916.173	90.410.759.184
27.	Kab. Padang Lawas	49.991.246.695	52.299.754.095	59.568.272.023	68.694.221.892
28.	Kab. Padang Lawas Utara	32.165.959.003	35.150.441.395	50.219.435.141	49.354.506.762
29.	Kab. Labuhanbatu Selatan	41.169.542.000	41.169.542.000	57.290.705.012	59.064.372.777
30.	Kab. Labuhanbatu Utara	35.326.053.722	43.182.972.000	51.069.120.952	56.772.355.964
31.	Kab. Nias Utara	28.000.000.000	32.005.000.000	71.897.203.571	12.540.000.000
32.	Kab. Nias Barat	24.000.000.000	28.740.000.000	50.000.000.000	17.721.453.072
33.	Kota Gunungsitoli	28.000.000.000	34.937.400.200	36.676.262.664	34.019.889.165

Lampiran 4

HASIL SPSS

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	5.1902	.46381	132
Belanja Modal	3.2635	.01903	132
PAD	3.2635	.01903	132

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.789 ^a	.623	.516	.45470	.623	5.788	2	7	.033	1.472

a. Predictors: (Constant), PAD, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.115	2	1.115	5.354	.022 ^b
	Residual	27.066	130	.208		
	Total	28.181	132			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), PAD, Belanja Modal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	9.011	.588		9.019	.000	.402	6.380					
1 Belanja Modal	.847	.494	.499	2.314	.022	4.997	5.430	.026	.037	.023	.996	1.004
PAD	.881	.553	.790	3.401	.011	.573	3.189	.789	.789	.789	.996	1.004

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

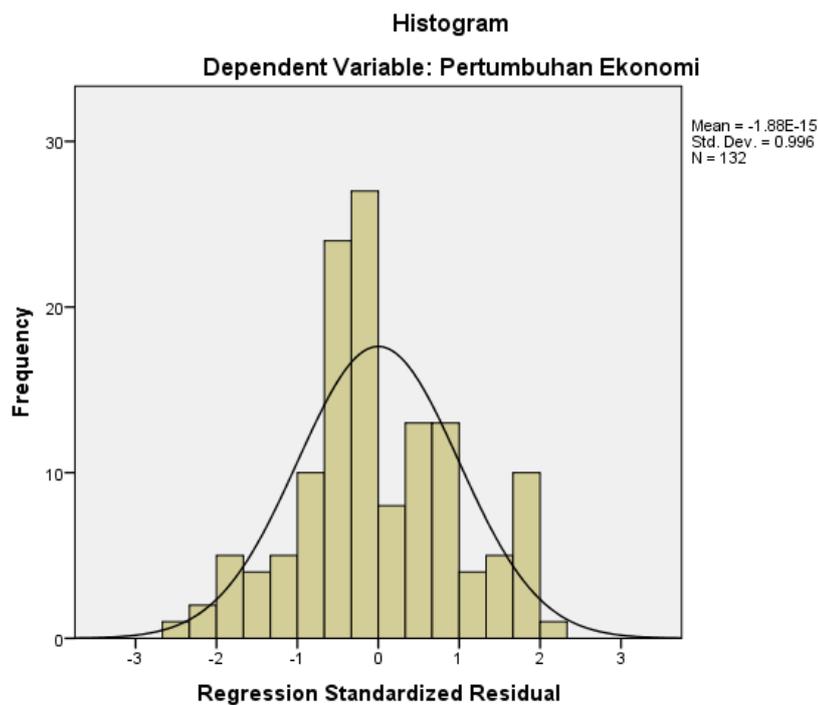
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Modal	PAD	Pertumbuhan Ekonomi
N		132	132	132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.2635	3.2635	5.1902
	Std. Deviation	.01903	.01903	.46381
	Absolute	.152	.152	.112
Most Extreme Differences	Positive	.152	.152	.112
	Negative	-.098	-.098	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.749	1.749	1.284
Asymp. Sig. (2-tailed)		.587	.900	.995

a. Test distribution is Normal.

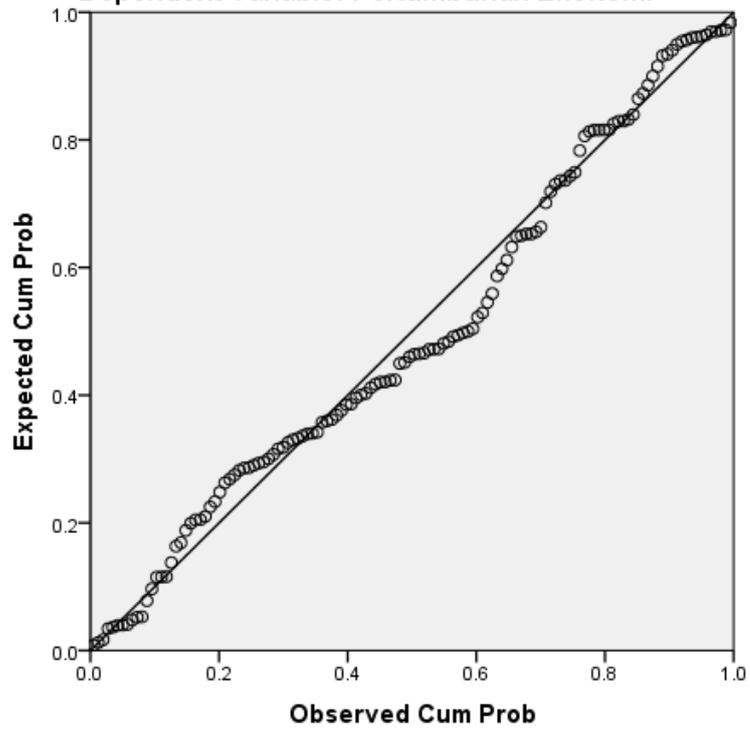
b. Calculated from data.

Charts



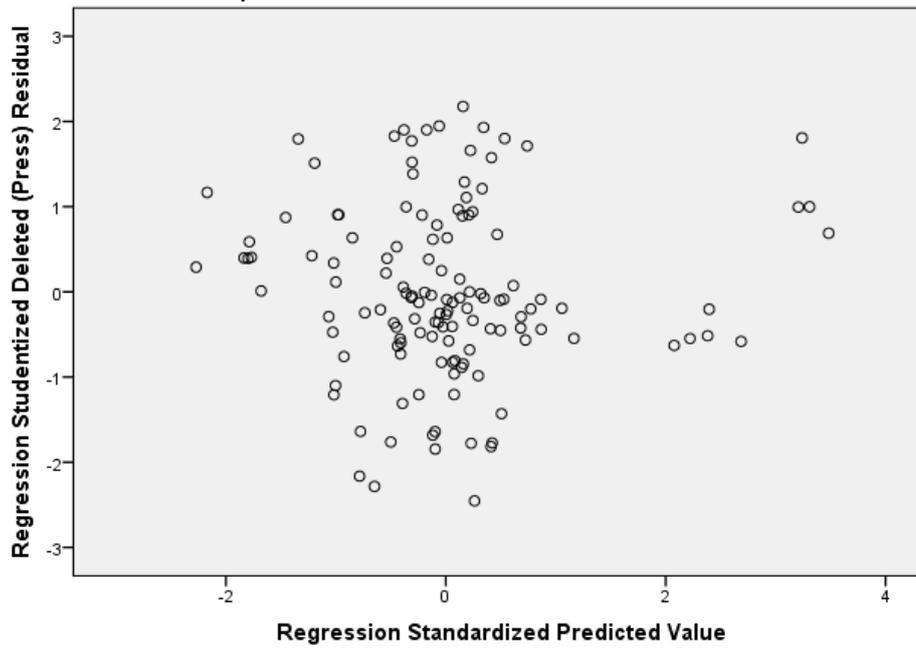
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



Scatterplot

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1385/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/21/12/2019

Nama Mahasiswa : Rifda Atiqoh Daulay

NPM : 1605170404

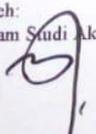
Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Sektor Publik

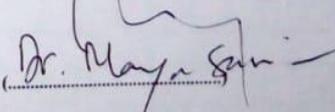
Tanggal Pengajuan Judul : 21/12/2019

Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Maya Sari, SE, M.Si. 21/12-2019 ✓

Judul Disetujui**) : Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

21/12.2019
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 21/12/2019
Dosen Pembimbing


Dr. Maya Sari

Keterangan:
*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditai oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
07 JULI 2020M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R I F D A A T I Q O H D A U L A Y

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 9 0 9

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 5 O K T O B E R
1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L M N A W I H A R A H A P
K O M P P E M D A B L O K J

Tempat Penelitian : J L G A P E B A D A N P U S A T
S T A T I S T I K K O T A M E D A N

Alamat Penelitian : J L G A P E R T A N O 3 1 1 H E
L V E T I A K E C M E D A N H E L
V E T I A K O T A M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)
 FITRIANIS

Wassalam
Pemohon

(.....)
 RIFDA ATIQOH DAULAY

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Rirde Atiqoh Daulay
 N P M : 1605170404
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 25 Oktober 1998
 Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Single / Belum menikah
 Alamat Rumah : Jl. M. Nawi Harahap Komp. Pemda blok J. No.16
 Tel. 089678198010
 Pekerjaan/Instansi :
 Alamat Kantor :
 Tel.:

Melalui surat permohonan tertanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 07 Agustus 2020

Saya yang Menyatakan



(Rirde Atiqoh Daulay)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1973/II 3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 15 Dzul qa'dah 1441 H
07 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pusat Statistik Kota Medan
Jl. Gaperta No.311, Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
Npm : 1605170404
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

[Signature]
R. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
NPM : 1605170404
Program : Sastra-I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam proposal atau data-data lainnya adalah saya peroleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan. Sebelum melampirkan balasan izin riset yang terkendala akibat pandemic, saya melampirkan surat pernyataan terlebih dahulu.

Medan, 07 Juli 2020

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
Rp. 6000
6000
ENAM RIBURUPIAH
Rifda Atiqoh Daulay



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1162/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 03 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
 N P M : 1605170404
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam
 Pengelolaan Desa

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Maya Sari.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Maret 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Medan, 07 Agustus 2020

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rida Atiqoh Dawlay
N P M : 1605170904
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Alamat : Jl. M. Nawal Harahap Komp. Pemda blok J. no.16
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahahan 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


(Rida Atiqoh Dawlay)

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Il. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Rifda Atiqoh daulay
NPM : 1605170404
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si.

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pada latar belakang dijelaskan fenomena / permasalahan yang terjadi baik yang terjadi di lapangan maupun berdasarkan penelitian sebelumnya - Pada latar belakang harus dijelaskan indikator setiap variabelnya - Pada identifikasi harus menyebutkan latar yang kuat - Rumusan masalah sesuai dengan judul nya yaitu pengaruh bukan analisis	18/06-2020	
Bab 2	- Pada landasan teori dijelaskan terlebih dahulu variabel y baru penjelasan variabel x - Pada kajian penelitian terdahulu dijelaskan terlebih dahulu sebelum tabel	18/06-2020	
Bab 3	- Definisi Variabel menjelaskan mengenai alat ukur masing-masing variabel.	18/06-2020	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka menggunakan mandeley	18/06-2020	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Dokumentasi.	18/06-2020	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	01/07-2020	

Medan, Juli 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rifda Atiqoh Daulay

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170404

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si

Judul Penelitian Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- latar belakang dijelaskan fenomena/ permasalahan yg terjadi dari lapangan atau penelitian sebelumnya - latar belakang dijelaskan indikator - identifikasi harus memiliki dasar yg kuat.	18/06-2020	
Bab 2	- pada landasan teori, dijelaskan terlebih dahulu variabel Y baru penjelasan variabel X	18/06-2020	
Bab 3	- Definisi variabel menjelaskan mengenai alat ukur masing-masing variabel.	18/06-2020	
Bab 4	- Pertajam Penjelasan pada pembahasan - menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah dan rumusan masalah yg ada pada bab 1 - hasil penelitian yg tdk berpengaruh lebih dipertajam permasalahan lainnya jelaskan mengapa berpengaruh & tdk berpengaruh	05/08-2020	
Bab 5	Kesimpulan dipertajam, dibuatkan berdasarkan dari resume pembahasan dan terkait dengan rumusan masalah yang ada pada bab 1	05/08-2020	
Daftar Pustaka	menggunakan mandeley	05/08-2020	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc untuk sidang meja hijau	06/8-2020	

Medan, Agustus 2020
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si)

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : Rifda Atiqoh Daulay
 Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 25 Oktober 1998
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Jln. M Nawu Harahap komp. Pemda Blok J
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI
 Email : rifdaatika@gmail.com
 Nomor HP : 089678198010

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 060818 (2004-2010)
2. SMP Negeri 6 Medan (2010-2013)
3. SMA N 5 Medan (2013-2016)
4. S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2016-2020)

Medan, Agustus 2020

Rifda Atiqoh Daulay



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 3415 /IL.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : RIFDA ATIQOH DAULAY

NPM : 1605170404

sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diadakan pada hari/tanggal:

Senin, 07 Rabi'ul Awwal 1441H / 04 November 2019M

Dinyatakan
LULUS

Medan, 07 Rabi'ul Awwal 1441 H
04 November 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua

Nur Rahman Amini, M.Ag

Sekretaris

Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A



ERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 1875/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2019

Dengan ini menyatakan bahwa,

RIFDA ATIQOH DAULAY

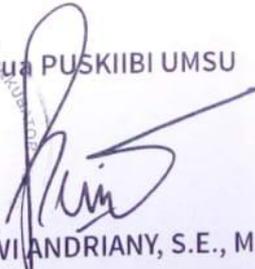
NPM : 1605170404

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 11 Desember 2019



Ketua PUSKIIBI UMSU

UMSU
Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M





Certificate of Achievement

Nomor : 0906/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2020

This is to certify that

Rifda Atiqoh Daulay

Date of birth October 25, 1998 Place Medan

Achieved the following scores on **TOEFL**

Test of English as a Foreign Language

Listening Comprehension : 41
 Structure and Written Expression : 26
 Reading Comprehension : 28



Head of Language Center

Rini Ekayati, SS, MA



UMSU